

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan dunia melihat ekonomi banyak terjadi ketidakseimbangan yang saling berhadap-hadapan di antaranya sistem kapitalisme dan sosialisme. Asas dalam perekonomian nasional menjunjung tinggi asas demokrasi dan keadilan, akan mampu memberikan peluang yang sama kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan selalu menjadi harapan bangsa Indonesia khususnya. Namun mahalunya ekonomi bagi rakyat, sehingga aktivitas ekonomi masih didominasi para pemilik modal (kaum borjuis).¹

Pemilik modal hanya memberikan sedikit ruang bagi rakyat secara keseluruhan cenderung dideskreditkan sebagai kaum lemah (Proletariat). Hal itu di tambah dengan posisi pemerintah baik sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai pelaku ekonomi belum secara optimal mampu mengalokasikan sumber daya ekonomi secara adil kepada pelaku ekonomi dari skala kecil hingga menengah. Situasi itu berbeda dengan lahirnya beberapa perundang-undangan di bidang perekonomian yang cenderung keluar dari kontitusi ekonomi berupa aturan pesanan dari pihak

¹ Reka Dewantara, *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2014, hlm. 196

investor asing demi memudahkan mereka menguasai potensi ekonomi yang di miliki Indonesia, inilah yang disebut kolonialisme model baru.²

Pasal 33 juga secara eksplisit menggambarkan bagaimana struktur ekonomi di lihat dari kepemilikan usaha diatur secara adil berdasarkan konstitusi. Negara yang di wakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan pemain utama yang mengelola sektor-sektor vital perekonomian. Secara tidak langsung hal itu juga mengindikasikan perlunya penguatan institusi negara dalam mengelola kekayaan alam, sehingga tidak tergantung dengan para pemilik modal asing.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyebutkan dasar ekonomi adalah produksi dikerjakan oleh semua untuk semua. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perseorangan. Cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Apabila tidak, maka tumpukan produksi akan jatuh ketangan orang yang berkuasa dan rakyat akan ditindasnya.³

Konstitusi memang menjadi jembatan antara rakyat dan negara. Di dalam UUD 1945, konteks hubungan antara rakyat dan negara salah satunya terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

² *Ibid*, hlm. 197

³ Taufiqurrahman Syahuri, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, hlm. 245

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pancasila sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan jiwa filosofis dari pasal 33 UUD 1945. Ada prinsip kuat yang diemban oleh sila kelima terkait dengan konsep keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Otentisitas sila kelima ditunjukkan dengan kesungguhan negara dengan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa Indonesia berdasarkan persatuan sebagai usaha nyata mewujudkan keadilan sosial. Pada saat penyampaian pidato Soekarno menggagas konsep kesejahteraan sosial yang dimaksudkannya adalah agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerintahan kepada seluruh rakyat dalam rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.⁴

⁴ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2010), hlm. 219

Hegel didalam pernyataanya “ apa yang masuk akal adalah yang nyata dan apa yang nyata adalah yang masuk akal”, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang di pikirkan pada satu waktu mempunyai hubungan yang pasti dengan suatu kejadian yang terjadi pada saat itu.⁵ Filsafat tidaklah bisa mengajarkan apapun pada dunia, filsafat hanyalah alat untuk memahami isi pokok dunia seperti apa adanya.

Kemudian gagasan Hegel ini diwarisi oleh Marx, yang melihat filsafat tidaklah terpisahkan dengan realitas didalam tesis kesebelasnya menulis “ para ahli filsafat hanya menafsirkan dunia dengan berbagai cara, akan tetapi persoalannya adalah mengubahnya”.⁶ Marx melihat ada hubungan antara realitas politik dan sosial yang tidak benar pada zamannya, sehingga filsafat juga mengena dengan tegas Marx berbicara pada arti pentingnya perubahan.

Sejarah lahirnya negara merupakan hasil dari kemerdekaan dan perjuangan Tokoh bangsa salah satunya adalah Tan Malaka, anak dari Minangkabau Sumatera Barat yang ikut bergerilya memperjuangkan Bangsa Indonesia dari belenggu para penjajah penindas kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme. Namun, sosok Tan Malaka hilang karena ada kepentingan dan konflik ideologi.

⁵ Christopher Llyod (ed), *Teori Sosial dan Praktek Politik* (Jakarta: Rajawali,1986), hlm. 42

⁶ Tan Malaka, *Madilog, Materialisme Dialektika dan Logika*, (Yogyakarta: Narasi 2014), hlm. 66

Tan Malaka merupakan pejuang revolusi dengan ide dan gagasannya yang timbul melalui pemikiran dan gerakan serta gerilya yang ia lakukan.⁷ Gagasannya merupakan suatu bentuk penyadaran dan pencerahan yang berafiliasi terhadap masyarakat sekaligus sebagai pemandu siapa yang harus dilawan, cara melakukan perlawanan, arah perlawanan, dan perubahan yang harus terjadi, sehingga dengan gagasannya itu ia sering sebagai fungsi dalam memimpin gerakan rakyat.

Bagi Tan Malaka Intelektual merupakan amunisi segudang gagasan dan konsep dalam pemikirannya yang di tuangkannya dalam beberapa tulisan yang menceritakan akan lahirnya kemerdekaan Indonesia. Ia mengatakan cita-cita kemerdekaan dan sosialis tidak akan terwujud jika tidak menggunakan usaha dalam mewujudkan gerakan revolusi total. Melalui Marxisme ia melebarkan sayap politiknya dengan cita-cita memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Adanya pemikiran itu yang membuat Tan Malaka ingin memperjuangkan rakyat dari keterpurukan, karena hasil jajahan Belanda yang menerapkan sistem kapitalisme.

Berangkat dari lahirnya paham kapitalisme di mulai dengan peristiwa revolusi industri pada tahun (1750-1840), di tandai dalam agenda pembuatan dan pengadaan suatu barang bermula barang itu di kerjakan sendiri dengan tangan manusia tapi setelah adanya revolusi industri semua berubah bukan lagi pembuatan barang melalui tangan manusia melainkan mengalami perubahan pesat melalui media yang di namakan mesin. Sehingga peran feodal dalam poros utama dengan menjajaki wilayah

⁷ Zulhasril Nasir, *Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. viii

perkotaan dan meninggalkan perdesaan yang diketahui sendiri dalam wilayah perkotaan pada taraf ekonomi administratifnya sudah mulai tumbuh beda dengan desa, sehingga sebagai landasan pembangunan masyarakat dengan sistem ekonomi baru.⁸

Sementara itu kaum petani sebagai kelas sosial kehilangan tanah garapnya dan terpisah dari alat-alat produksi masa lalunya, bergerak mencari kehidupan yang melemparkan mereka secara niscaya ke pasaran kerja sebagai buruh upahan. Akhirnya terjadi kerumitan stratifikasi sosial disederhanakan menjadi dua kelas besar, yaitu kelas penindas (borjuasi) dan kelas terhisap (proletariat) dengan pola hubungan yang ditandai dengan dominasi dan eksploitasi.⁹

Seperti lahirnya Kapitalisme di Eropa hal inilah yang menjadi perhatian menarik tokoh pergerakan di Indonesia untuk memakai Sosialisme sebagai gerakan dalam membongkar ketidakadilan, karena seperti realitas yang ada kekayaan dihasilkan para Imperialis melalui pengorbanan besar rakyat Indonesia dan menghasilkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang kentara.

Pada masa pra kemerdekaan itu kepentingan-kepentingan negara imperialis yang lain bermain di wilayah Indonesia, seperti perusahaan-perusahaan multinasional dari Inggris, Amerika dan Jepang bersama-sama dengan penjajah Kolonial Belanda

⁸ Harry Prabowo, *Perspektif Marxisme Tan Malaka: Teori dan Praksis Menuju Republik*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 94

⁹ *Ibid*, hlm. 95

menguasai sektor-sektor ekonomi vital dari sumber daya alam di Indonesia.¹⁰ Sehingga rakyat Indonesia seolah-olah berdiri diatas kaki orang lain dan terkepeng oleh kepentingan negara.

Berbekal pemikiran untuk membebaskan, Tan Malaka membentuk arah gerakan perjuangan. Gerakan perjuangan di Indonesia mempunyai ciri yang identik dalam mengidentifikasi musuh bersama dengan Sosialisme sebagai caranya, mereka melihat berlandaskan realitas adanya ketidakadilan, penindasan dari imperialisme dan kapitalisme, di mana monopoli perdagangan sumber daya alam Indonesia tanpa kemakmuran bagi rakyat Indonesia, ini menimbulkan cita-cita kemerdekaan dan semangat memberontak untuk merubah keadaan yang ada.

Tan Malaka merupakan pahlawan revolusioner yang memiliki gagasan tentang sosialisme, cita-citanya sendiri tentang sosialisme adalah kehidupan dalam masyarakat yang tidak ada suatu kelas dengan asas keadilan terhadap suatu persamaan yang berlaku di masyarakat sehingga tidak ada pertentangan. Sosialisme itu dapat menghilangkan pertentangan dan penindasan oleh kelas yang berkuasa dengan kelas yang tidak berkuasa, akhirnya sosialisme menjadi kultur masyarakat baru yang berdasarkan kepada perikemanusiaan dan perikeadilan, perjuangan yang diinginkan sebenarnya bukan hanya perjuangan ekonomi politik saja melainkan kehidupan masyarakat yang bermartabat.

¹⁰ Ricklefs M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005), hlm.223

Lahirnya konsep sosialisme dilatarbelakangi oleh kapitalisme penjajah Belanda yang merusak Indonesia. Semuanya terlihat di kehidupan pada saat Belanda menjajah Indonesia semua aspek yang dijadikan komoditi diekspor untuk kepentingan Belanda. Akhirnya Tan Malaka menilai bahwa dengan semakin tumbuhnya kapitalisme di Indonesia maka akan sengsaralah kehidupan bangsa. Melihat kondisi ekonomi Indonesia akibat dari penjajahan yang lama menjadi tantangan tentang gagasan sosialisme itu apakah harus dijalankan.

Sosialisme sebagai faham yang memperjuangkan pemerataan, pemilikan sarana produksi dan pemerataan hasil-hasil produksi.¹¹ Tan Malaka yakin bahwa konsep sosialisme tepat jika digunakan sebagai alat perlawanan terhadap realitas objektif rakyat Indonesia yang dihisap oleh kapitalis Belanda. Menghadapi sosialisme sebagai faham untuk memperjuangkan tuntutan pembebasan dari ketidakadilan sampai merata dan kemerdekaan Bangsa Indonesia mempunyai cara tertentu di dalam perjuangan pencapaiannya.

Dalam konteks Keadilan Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji,

¹¹ Ign, Gatut Saksono, *Marhaenisme Bung Karno: Marxisme Ala Indonesia*, (Yogyakarta: Ardana Media, 2008), hlm. 14

kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹² (QS. An-Nahl : 90).

Hasil analisa peneliti terhadap latar belakang masalah semua terjadi atas kekuasaan yang menindas diciptakan melalui hegemoni barat. Sehingga terbentuk sistem Imperialisme, Kapitalisme dan Kolonialisme di Indonesia, kemudian hasil analisa itu termuat dalam latar belakang masalah perlu dibuat teori pendukung. Peneliti memberikan gambaran teori singkat mengenai problematika yang terjadi yaitu dengan teori politik ekonomi dan teori keadilan.

Teori politik ekonomi merupakan kebijakan yang dijalankan dalam merenovasi keburukan ekonomi yang sedang berlangsung. Artinya dalam gagasan teori itu ingin membuat kehidupan masyarakat dengan ekonomi yang lebih baik dan meningkat, karena dengan politik dan ekonomi keduanya memiliki hubungan erat dengan faktor-faktor produksi, keuangan, perdagangan, dan kebijakan pemerintah melalui bidang moneter, fiskal dan komersial.

Teori keadilan dalam bacaan peneliti belum lagi tercapai karena kita tidak hidup di dunia yang adil. Dialektika hegel digunakan peneliti dalam merumuskan konsep teori yang cara analisa meliputi tesis, antitesis, dan sintesis. *Pertama* John Locke dengan gagasannya tentang *Liberalisme*. *Kedua* gagasan Karl Marx tentang *Sosialisme*. *Ketiga* John Rawls melihat gagasan Locke tentang liberalisme akhirnya membenarkan ketimpangan sosial sedangkan Marx tentang sosialisme menyingkirkan

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Karim Terjemah dan Tajwid*, (Surakarta: Az-Ziyadah, 2014), hlm. 5

kebebasan. Kemudian Rawls dengan gagasannya menyatukan dua pemikiran dalam *Justice Of Fairness*.

Berdasarkan penjelasan diatas, berbicara mengenai konsep politik dan kapitalisme di Indonesia Tan Malaka hadir untuk memberikan perlawanan sangatlah menarik untuk diurai dalam sebuah penelitian skripsi bagi saya, dengan mengangkat judul **“Konsep Politik Tan Malaka Dalam Melawan Kaum Kapitalisme Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dalam penelitian:

Bagaimana konsep politik Tan Malaka dalam melawan hegemoni Kapitalisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui konsep politik Tan Malaka dalam melawan hegemoni Kapitalisme di Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar memberi manfaat antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan konsep-konsep atau teori-teori substantif yang dapat memperkaya studi tentang politik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para teoritis, praktisi, dan pemikiran politik dalam mengemas nilai-nilai perjuangan dan menjadi kajian yang menarik. Selanjutnya memberikan motivasi bagi para akademisi untuk lebih kreatif dalam menimbulkan teori-teori baru dan mengembangkan penelitian baru mengenai pemikiran politik.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah paham terhadap judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Konsep adalah rancangan .¹³ konsep atau rancangan yang dimaksud penulis adalah bentuk gagasan Tan Malaka yang ia rumuskan dalam sebuah gerakan atau perlawanan.
2. Politik adalah sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik.¹⁴ Politik dalam tulisan peneliti yang dimaksud adalah sejauh mana politik

¹³Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2008), hlm. 498

¹⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 14

digunakan sebagai jalan maupun cara mengelola sebuah negara yang masih kecil masa transisi kemerdekaan sehingga tercapainya suatu konsep yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia.

3. Tan Malaka sebagai sosok tokoh pembaharu dalam hal politik dan juga berbicara tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa terlepas dari penjajahan di bumi nusantara ini.¹⁵ Maksud peneliti dengan menghadirkan sosok Tan Malaka kembali bahwa bangsa Indonesia jangan lupa dalam masa perjuangan kemerdekaan Indonesia ada tokoh yang luar biasa dalam berjuang bergerilya untuk membebaskan bangsa dari kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme.
4. Kapitalisme di Indonesia adalah cangkakan dari Eropa dalam beberapa hal tak sama dengan kapitalisme yang tumbuh dan dibesarkan dalam negerinya sendiri, yakni Eropa dan Amerika Utara.¹⁶ Kapitalisme yang diuraikan peneliti maksudnya ada perbedaan dengan kapitalisme yang ada di negara lain bahwa bangsa Indonesia masih dalam transisi penjajahan dan kemerdekaan sehingga masih terlihat sangat bayi lalu dalam kondisi ini kolonial Belanda memanfaatkan untuk menjajah kembali dengan menerapkan sistem kapital.

¹⁵ Pita Hitam, *Filsafat Politik Sebagai Senjata Revolusi*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), hlm. Vi

¹⁶ Tan Malaka, *Aksi Massa*, (Yogyakarta: Narasi, 2019), hlm. 45

F. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis ada penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan apa yang penulis teliti saat ini namun penelitiannya berbeda, yang mana judul adalah :

1. Skripsi dari Ahmad Zarfani, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang berjudul "Pandangan Tan Malaka tentang Marxisme dan Agama, Zarfani dalam Skripsi ini lebih membahas pemikiran Tan Malaka tentang Marxisme dan Agama, dari skripsi ini kita dapat mengetahui pandangan Tentang Marxisme dan Agama. Tan Malaka mengatakan yang dikutip oleh Zarfani.

Marxisme sendiri oleh Tan Malaka ditafsirkan dengan, bagaimana manusia harus berperilaku lurus sesuai dengan hukum alam. Madilog merupakan cara pengejawatan suatu cara berpikir yang menuntut agar manusia konsuekan dengan kelurusan hukum-hukum alam itu, teratur, sistematis dan mengaktifkan seluruh energi berpikir kita untuk memandang hidup sebagai struktur yang mendorong kita untuk membuat supaya kita terstruktur pula, dan untuk itu manusia mempunyai tujuan hidup yang jelas. Tan Malaka mengatakan bahwa marxisme bukanlah dogma melainkan petunjuk untuk revolusi. Dan Tan Malaka juga mengatkan juga bahwa marxisme tidak bisa disalin begitu saja terhadap bumi Indonesia, karena Indonesia berlainan dengan kondisi di Eropa.¹⁷

¹⁷ Ahmad Zarfani, *Pandangan Tan Malaka terhadap Marxisme dan Agama*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002), hlm. 20

2. Skripsi M.A. Hisyam Karim, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), mengenai Tan Malaka yang berjudul “Agama dalam Pandangan Tan Malaka”. Pada Skripsi ini lebih pada Tan Malaka dalam memandang hal Agama, menurut Tan Malaka yang dikutip dari Hisyam Karim:

*Agama sebagai urusan pribadi yang memiliki kebebasan berpendapat dan berkepercayaan. Kepercayaan pada masing-masing seseorang sesuai dengan kecocokan. Ia menjelaskan benar tidaknya suatu kepercayaan itu terserah pada otak perasaan, kemauan atau singkatnya pada jiwa masing-masing.*¹⁸

Berbeda sekali ketika di buat sebuah komparasi antara skripsi peneliti dan skripsi dua orang di atas yang kita ketahui skripsi peneliti yaitu ingin mengetahui sebuah suatu konsep politik Tan Malaka dengan melawan musuhnya yaitu kapitalisme sedangkan dua skripsi di atas tadi lebih ke hal agama dan Marxisme sehingga memiliki perbedaan yang Universal. Sehingga skripsi ini akan melihat sebuah konsep ataupun peran politik Tan Malaka dalam hal gerakan revolusi ataupun perlawanan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penindasan penghisapan dan menuju kepada Indonesia Merdeka 100%.

¹⁸ M.A Hisyam Karim, *Agama Dalam Pandangan Tan Malaka*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), hlm. 64

G. Kerangka Teori

Penelitian tentang konsep politik Tan Malaka dalam melawan kapitalisme di Indonesia didasari teori dasar yaitu teori politik ekonomi. Dengan demikian beberapa teori inilah yang nantinya sebagai pisau analisa peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Teori-teori yang digunakan adalah :

- a. Teori Politik Ekonomi
- b. Teori Keadilan

Ada dua teori yang memiliki sebuah relevansi dengan latar belakang masalah dan juga penelitian ini yang sangat berkaitan dengan teori yang akan mengawali penelitian ini, sehingga dua teori ini yang akan mendukung berbagai permasalahan yang diteliti.

Teori politik ekonomi merupakan kebijakan yang dijalankan dalam merenovasi keburukan ekonomi yang sedang berlangsung. Apabila ditinjau dalam definisi mengenai teori politik ekonomi maka tujuan dari gagasan teori itu adalah menjadikan kehidupan masyarakat dengan ekonomi lebih baik atau lebih meningkat.¹⁹ Politik dan ekonomi yang berkolaborasi kemudian dua komponen ini memiliki hubungan yang sangat keterkaitan erat dengan faktor-faktor produksi, keuangan, perdagangan dalam kebijakan pemerintahan seperti dalam bidang moneter,

¹⁹ Hudyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 15

fiskal dan komersial. Pada dasarnya motif politik ekonomi dalam kegiatan ekonomi pasti ada peran dari motif politik tidak bisa di pungkiri.²⁰

Dilihat dari pendekatannya politik dan ekonomi mempunyai sifat yang sangat kental untuk memberikan sebuah penafsiran bahwa politik ekonomi suatu hal yang berbeda. Ini berangkat bahwa pemikiran bahwa pasar dapat memperbaiki sendiri jika ada kegagalan-kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasar itu sendiri.

Pandangan ini menekankan bahwa ekonomi harus berada di luar wilayah politik karena efektif atau tidaknya sebuah pasar itu tidak adanya campur tangan atau intervensi dari pemerintah. Hal ini merupakan khas pemikiran kaum klasik namun bila dari sudut pandang ekonomi adalah perekonomian maka ekonomi membutuhkan yang namanya kerangka politik dan instrument hukum di dalamnya akan terlihat adanya sebuah keterkaitan secara langsung maupun tidak bahwa sebuah tindakan pelaku pasar ekonomi dan ekonomi itu sendiri memiliki hubungan erat dengan politik.

Keterkaitan antara politik dan ekonomi tidak kenal yang namanya batasan-batasan yang kuat untuk menyekat satu dengan yang lain, seperti sistem politik saat ini yang sangat memiliki pengaruh dalam perihal menentukan konsep ekonomi yang dilakukan. Di sini kontribusi besar ekonomi pun terlihat saat memberikan sumbangan terhadap politik sehingga dengan politiklah sebuah sumber daya bisa dialokasikan

²⁰ Azwir Dainy Tara, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2000), hlm. 30

dalam instrument pemerintahan guna mewujudkan cita-cita tertinggi negara yang bersangkutan.²¹

Dalam perjalanan sejarahnya, ilmu politik dan ekonomi dalam menganalisa fenomena ekonomi mendapatkan bahwa unsur dari politik merupakan bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari ekonomi. Meskipun politik dan ekonomi memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menganalisa suatu masalah, namun keduanya bisa disatukan dengan pertimbangan perhatian yang sama dalam menganalisis isu-isu, mengorganisasi suatu kondisi, mengelola konflik, menyediakan kebutuhan dan kepuasan bagi kebutuhan manusia.

Pemikiran Karl Marx tentang negara sebagai tawanan borjuis, Marx mengatakan pemikiran itu sangat kompleks, sebagian pun juga karena Marx juga mensintesa banyak bidang yang memiliki pengaruh terhadap intelektual yang dipersatukannya. Pandangan Marx mengenai ekonomi di sini bisa memberikan sketsa sederhana mengenai ekonomi di masyarakat, dengan sebuah rujukan khusus pada pernyataan perihal dalam kekuatan politik. Menurut Marx, di dalam masyarakat apapun tahap perkembangannya baik dari segi sejarahnya, berada pada landasan ekonomi. Marx menyebutkan ini bagian mode-mode produksi dan komoditi.²²

Selanjutnya mode produksi itu mempunyai 2 hal penting. *Pertama* adalah kekuatan produksi, atau pengaturan teknologi dan fisik dari kegiatan ekonomi. *Kedua*

²¹ Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 43

²² Yunus Handoko, *Pemikiran Ekonomi Marx*, Jurnal Jibeka Volume 7 No 2 (2013), hlm. 66

adalah relasi sosial dan produksi, atau kelengkapan mutlak manusia bahwa orang itu harus memiliki hubungan dalam melaksanakan ekonomi ini. Tapi masyarakat bukan hanya terdiri atas struktur ekonomi saja. Berada di puncak merupakan struktur super apa yang dikatakan oleh Marx atau disebutnya kompleks antara hukum, politik, keagamaan, estetika dan lembaga-lembaga lainnya. Mengenai hubungan produksi itu bagian dari struktur masyarakat landasan dan struktur super legal, politik, mode produksi menentukan sifat umum dari proses sosial, politik, spritual dan kehidupan.

Perangkat hubungan-hubungan sosial yang paling mendasar yang hidup dalam proses produksi adalah struktur kelas, atau pembagian masyarakat dalam sebuah sistem kelas yang diketahui pembagian itu diantaranya kelas si kaya yang berkuasa dan si miskin yang dieksploitasi. Di bawah mode produksi kapitalis Marx menganalisis kapitalisme secara detil kedua kelas ini adalah borjuis dan proletar. Kelas borjuis memiliki alat-alat produksi, mengarahkan proses produksi, dan memetik laba dari padanya. Sedangkan kelas proletar buruh upah yang bekerja dengan memberikan tenaganya, tidak mendapatkan imbalan dengan maksimal.

Berdasarkan hubungan produksi ini artinya mengharapkan keberadaan negara, gereja, masyarakat, tentunya semua struktur super itu beroperasi melayani suatu kelas borjuasi dan membantu para buruh tetap di bawah. Contohnya, politikus dan polisi akan menindas ketidakpuasan buruh, dan para pemimpin keagamaan akan mengkhotbahkan ajaran kepada massa untuk membuat mereka yakin bahwa akan ada

kebahagian kehidupan di masa akan datang dengan tidak adanya penindasan dalam kehidupan mereka.²³

sekarang akan memeriksa hubungan antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik. Marx mengasumsikan bahwa kelas kapitalis itu merupakan kelas yang memiliki akses terhadap kekuasaan karena dalam struktur ekonomi ia memiliki alat-alat produksi dan ia membeli jasa-jasaa buruh. Sebaliknya, buruh memiliki tenaga kerja untuk dijual dan hanya sebatas upah yang diterima atas hasil kerjanya. Karena dalam hal ini yang unggul kaum kapitalis dalam hal posisi yang mampu mengeksploitasi buruh dengan memperpanjang jam kerja, memaksa istri dan anak-anak untuk bekerja, mempercepat mesin-mesin dan mengganti buruh dengan mesin yang lebih produktif.

Kekuasaan kapitalis juga semakin di perkuat oleh penguasa politik yang mengeluarkan undang-undang yang merugikan para buruh dan mematikan setiap usaha buruh untuk protes. Dalam keadaan ini, kekuatan politik dalam masyarakat di masukkan jasa-jasa kekuatan ekonomi, Marx mengungkapkan bahwa kekuatan ekonomi dan politik bukanlah suatu kekuatan yang abadi. Dalaam realitasnya, dalam setiap jenis sistem ekonomi itu mengandung apa yang disebutnya, benih-benih kehancuran sendiri. Misalnya, kapitalisme kelas borjuis yang didorong oleh usaha mereka dan meningkatkan laba mereka secara berangsur-angsur membuat para buruh sengsara dan menjadi putus asa.

²³*Ibid*, hlm. 67

Keadaan ini menjadi lebih serius oleh terjadinya krisis ekonomi yang semakin berat. Bagaimana tanggapan para buruh mula-mula mereka tetap terisolir dalam persaingan satu sama lain dengan tidak terorganisir, mereka hanya sanggup mengganggu alat-alat produksi. Misalnya, merusak mesin-mesin dan serangan yang salah terhadap sisa tatanan feodal. Dengan demikian berkumpulnya para buruh semakin dekat satu sama lain dalam pabrik, dan gerakan industri melenyapkan perbedaan diantara mereka. Mereka menjadi kelompok yang diarahkan untuk aksi kolektif, seperti halnya serikat pekerja, mereka sekarang sanggup memaksakan pengakuan terhadap diri mereka dan mencapai kemenangan dalam legislatif seperti undang-undang yang membatasi jam kerja.

Buruh juga akhirnya mencapai tingkat kematangannya, mereka membentuk partai revolusioner yang bangkit dengan gagasan untuk menghancurkan sistem kapitalis dan merintis suatu sistem yang dinamakan sosialis. Karl Marx mempunyai gagasan yang kompleks mengenai relasi kekuatan ekonomi dan politik dalam tahap perkembangan suatu sistem ekonomi, pengatur politik mendukung pengaturan ekonomi dalam tahap degenerasi, kekuatan keduanya sebenarnya sangat bertentangan dan akhirnya konflik ini membawa kepada kehancuran sistem politik dan kemudian kehancuran sistem ekonomi. Pada setiap waktu, hubungan fungsional antara kekuasaan ekonomi dan politik itu tergantung pada tahap perkembangan masyarakat.

Sejarah bergerak maju secara dialektis menuju kebebasan yang semakin besar dan rasional sehingga Friedrich Hegel merumuskan metode dialektika yang dipertentangkannya lalu didamaikannya, atau biasa dikenal dengan Tesis

(Pengiayaan), Antitesis (Peningkaran), dan Sintesis (Kesatuan Kontradiksi) yang dirumuskankan dalam teori :

1. Teori keadilan dalam liberalisme klasik adalah sebuah pandangan filosofis yang didasari oleh pemahaman bahwa kebebasan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Liberalisme membuat sebuah karakteristik kehidupan pada masyarakat dengan ciri kebebasan, perlakuan sama dihadapan hukum, penghargaan hak dan kepemilikan properti secara individual, serta penolakan pembatasan oleh negara dan agama. Liberalisme memiliki akar yang kuat pada pemikiran John Locke seorang filosof Inggris yang gagasannya tentang keadilan di tuangkan ke dalam pemikiran tentang negara.²⁴

John Locke membagi perkembangan masyarakat dalam keadaan alamiah, dalam keadaan alamiah ini Locke menjelaskan tiap-tiap orang hidup dalam keadaan harmonis yang ditandai dalam kebebasan dan kesamaan hak. Dalam keadaan alamiahlah manusia bebas sebebannya dan tidak ada yang lebih berkuasa dari pada yang lain.²⁵ Manusia bebas karena mereka terlahir dari species yang sama yakni manusia yang secara alamiah bebas dan menikmati alam secara sama. Akan tetapi, keadaan alamiah yang dijelaskan Locke tidak seekstrem yang dijelaskan oleh Hobbes, menurut Hobbes keadaan alamiah itu adalah keadaan yang digambarkannya sebagai keadaan perang semua lawan semua lantaran berhak atas semua.

²⁴ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), hlm. 336

²⁵ John Locke, *Kuasa itu Milik Rakyat: : Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kansius, 2002), hlm. 25

Bagi Hobbes manusia adalah srigala bagi manusia lain, sementara itu Locke keadaan alamiah itu ditandai dengan keadaan yang harmonis. Dalam keadaan yang dikemukakan oleh Locke bahwa manusia bebas menentukan hidupnya tanpa tergantung terhadap orang lain. Artinya, tiap-tiap individu tidak bertindak semaunya sendiri. Hukum alam mewajibkan setiap orang untuk memandang yang lain setara dan sederajat sehingga Locke menegaskan dalam keadaan ilmiah bahwa setiap orang tidak boleh menghancurkan orang lain, tidak boleh menghilangkan atau merusak hidup, kebebasan, kesehatan, anggota badan dan kepemilikan properti.²⁶

Masing-masing orang dalam keadaan alamiah hidup dalam kebebasan tanpa ada ancaman kondisi itu terjadi karena tiap-tiap orang hidup berdasarkan ketentuan hukum kodrat yang diberikan oleh tuhan. Artinya, keadaan alamiah yang serba harmonis itu lambat laun akan berubah menjadi perang, keadaan munculnya permusuhan kejahatan kekerasan saling menghancurkan dan melenyapkan. Locke mengatakan perihal keadaan seperti itu muncul yang menjadi justifikasi utamanya adalah sumber paling vital yaitu uang.

Seiring terciptanya uang maka Locke menjelaskan bahwa dalam keadaan alamiah manusia hanya mempunyai barang untuk mereka pergunakan maka dengan adanya uang manusia akan mengumpulkan dan menimbun kekayaan yang berlebihan. Apabila dalam keadaan alamiah manusia dalam mengumpulkan harta tidak terlihat mencolok dikarenakan mereka tidak akan mengumpulkan sebagaimana lebih dari apa yang mereka konsumsi sedangkan seiring terciptanya uang manusia justru

²⁶ Alfensius Alwino, *Diskurus Mengenai Keadilan Sosial*, (Jakarta: Melintas, 2016), hlm. 312

mengusahakan untuk menumpuk dan mencari suatu kekayaan melebihi dari jumlah yang ia konsumsi dan pastinya akan melebihi sebagai jangka panjang atau untuk waktu lama.

Menurut Locke akibat uang inilah yang menjadi cikal bakal terciptanya ketidaksamaan. Ketidaksamaan dalam jumlah harta kekayaan ini membuat manusia terpecah dalam label tuan dan budak, majikan dan pembantu, borjuis dan proletar. Mereka yang lebih tekun trampil dan lebih pintar maka akan cepat menjadi lebih kaya. Sebaliknya mereka yang tidak kreatif pemalas miskin cacat dan tidak memiliki properti akan tetap miskin. Status berdasarkan kekayaan membuat jurang antara yang miskin dan kaya semakin lebar.

Akibat dari pembeda antara orang miskin dan orang kaya maka akan muncul di masyarakat dengan suatu perasaan iri, dengki, saling curiga dan manusia hidupnya akan penuh dengan persaingan. Akan ada perasaan negatif karena dari persaingan tadi manusia satu akan berhadapan dengan manusia yang lainnya. Dengan demikian keadaan alamiah yang serba harmonis berubah menjadi keadaan perang yang ditandai dengan permusuhan kedengkian kekerasan dan saling menghancurkan keadaan perang seperti inilah yang berpotensi besar memusnahkan kehidupan sesama manusia dan seluruh harta miliknya.²⁷

Menurut Locke pemusnahan dan penghancuran masih bisa di atasi ketika masyarakat sepakat dalam mengadakan perjanjian asali. Bagi Locke inilah yang nantinya akan menghasilkan negara persemakmuran. Negara berdiri bukan tujuannya

²⁷ *Ibid*, hlm. 313

untuk menciptakan kesemerataan setiap orang tapi untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Bagi Locke hukum diciptakan bukan pertama untuk pembatasan melainkan pembimbingan hidup kepada seorang yang bebas dan cerdas demi kepentingan sendiri.

Dengan kata lain tujuan hukum adalah untuk melestarikan dan memperbesar kebebasan. Locke mengemukakan bahwa negara yang digagaskan sebagai hasil perjanjian asali bukanlah negara absolut yang dijelaskan oleh Hobbes melainkan negara memiliki peran yang terbatas kekuasaan negara tidak mutlak karena kekuasaannya pun berdasarkan dari warga negara yang mendirikan. Dengan demikian negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya. Sehingga teori keadilan dalam liberalisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Locke kemudian ditanggapi oleh filosof sosial yaitu Karl Marx.

2. Teori keadilan dalam sosialisme Karl Marx memberikan sebuah implikasi terhadap pandangan Locke mengenai kebebasan dan kesetaraan dampaknya terlihat sangat kuat pada masyarakat Inggris pada kurun waktu abad ke XIX. Marx melihat bahwa industrialisasi sudah mewarnai dalam kehidupan masyarakat Inggris, sehingga ekonomi akan menjadi pengaruh kuat yang nantinya ekonomi akan berada di tangan orang-orang tertentu dan semangat liberalisme yang di gaungkan oleh Locke akan membuka jalan bagi tiap orang untuk mendirikan dan mengembangkan kebebasannya dengan adanya pabrik dan membeli mesin-mesin.

Faham mengenai ajaran sosialisme merupakan ajaran yang menyatakan bahwa kekayaan dunia merupakan milik semua dan kepemilikan secara bersama lebih baik dari kepemilikan secara pribadi. Di katakan baik karena tidak adanya kelas sosial sehingga prinsip ini meniadakan perbedaan kaya miskin, borjuis buruh, dan pemodal dengan pekerja. Sosialisme menentang hasrat untuk mengejar sebuah keuntungan secara pribadi, karena cara mencari keuntungan pribadi akan membuat manusia itu menjadi sumber keburukan diantaranya iri hati, perang dan akhirnya akan menimbulkan perang saudara.²⁸ Marx menyatakan bahwa di dalam persaudaraan tidak ada yang namanya ketimpangan terjadi semua orang sama tidak ada yang memiliki berlebihan dan tidak ada yang kekurangan.

Analisa Marx mengenai ketegangan ekonomi terutama dalam relasi mengenai produksi, yakni ada pertentangan kepentingan antara kaum buruh (kelas bawah) dan kaum borjuis (kelas atas) menurut Marx ketegangan dimulai oleh perkembangan kepemilikan alat-alat produksi.²⁹ Akibat kepemilikan yang dikelola dengan sendiri maka akan terpecah dalam susunan masyarakat yakni kapitalis sebagai pemilik alat kerja dan proletar sebagai buruh-buruh yang bekerja kepada kapitalis. Ide mengenai kepemilikan alat-alat produksi tidak terlepas dari sistem akumulasi kepemilikan sebagaimana yang telah di gagaskan oleh Locke.

²⁸ Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001), hlm. 14

²⁹ *Opcit*, hlm. 314

Pemikiran Locke apabila kita mengikuti alurnya maka Marx mengatakan bahwa liberalisme membuka ruang bagi tiap orang untuk mengembangkan kebebasannya mendirikan pabrik dan membeli mesin-mesin. Alat produksi kemudian akan jatuh ketangan individu (kapitalis) dan kepemilikan itu menjadi milik pribadi untuk mereka. Selanjutnya mereka menggunakan tenaga para buruh untuk menjalankan mesin-mesin tersebut demi melipat gandakan produksi mereka artinya proses produksi tenaga kerja (buruh) yang telah dibeli merupakan bagian dari kapital, karena selama bekerja si pekerja akan menambahkan nilai produksi yang di transformasikan dalam nilai produk dalam mengeluarkan tenaga kerjanya.

Para buruh di tangan kapitalis yang telah membelinya, para buruh juga tidak ada perkembangan dalam kehidupan tidak ada kemajuan lantaran pemilik modal kapitalis yang memiliki sebuah kekuasaan mutlak atas mereka. Para kapitalis yang menentukan gaji mereka dan memecat mereka apabila buruh tadi sudah tidak diperlukan lagi para pemodal memaksa buruh untuk bekerja sesuai kehendak mereka yang sewenang-wenang, Marx menyebutnya kolonisasi penjajahan atas kaum kapitalis terhadap buruh kapitalis mengeksploitasi buruh dan memonopoli keuntungannya.³⁰

Bagi Marx situasi seperti ini adalah belenggu bagi para buruh karena para buruh tidak menjadi manusia yang otentik. Maka hidup dalam keterasingan (alienasi). Marx menggambarkan kehidupan para buruh terasing dari pekerjaannya karena keuntungan dari pekerjaannya akan dinikmati oleh para pemilik modal saja. Selain itu

³⁰ *Ibid*, hlm. 315

juga mereka akan terasing sesama para buruh karena mereka akan sama-sama berebut pekerjaan dan mereka akan terasing dari majikannya karena hidup mereka hanya ketergantungan terhadap majikannya karena majikan yang berkuasa sehingga semena-mena mengatur kehidupan para buruh.

Keterasingan pada diri sendiri juga terlihat karena mereka tidak memiliki harga diri lagi menurut marx keterasingan para buruh yang paling dalam adalah para buruh tealienasi dari hasil pekerjaan mereka situasi keterasingan inilah yang membuat buruh tetap akan miskin, bagaimanapun usaha mereka untuk maju.³¹ Anehnya buruh terbelenggu dengan situasi ini justru bisa bertahan dalam tatanan suatu negara. Marx mengatakan bahwa situasi seperti ini memang bertahan selama berabad-abad lamanya karena dua ciptaan manusia, yakni negara dan tata hukum.³² Negara mengeluarkan produk hukum dan aturan-aturan yang disusun oleh orang-orang berkuasa, aturan disusun terutama untuk melindungi orang-orang yang berkuasa, undang-undang juga dibuat untuk kepentingan mereka dalam masyarakat yang secara de facto terpetakan ke dalam kelas masyarakat berkuasa dan rakyat biasa.

Sehingga lingkaran kekuasaan justru diisi oleh para pemilik modal sebagai implikasinya undang-undang dibuat sebenarnya hanya untuk melayani mereka. Marx mengatakan bahwa negara ikut memperkuat posisi mereka karena negara juga

³¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam lintasan sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 113

³² *Ibid*, hlm. 113

merupakan organisasi para pemilik pemodal atau kapital. Melalui negara sebenarnya kapital mampu mempertahankan keadaan masyarakat yang dapat menguntungkan mereka. Menurut Marx agama juga memiliki andil besar dalam mendukung posisi kaum kapitalis bahwa dalam pemikiran agama merupakan opium yang menjadikan masyarakat agar pasrah menerima keadaan agama dikatakannya adalah candu bagi masyarakat membuat semangat orang untuk berjuang melebur agama pula membuat orang miskin dan tertindas bersabar dalam penderitaanya.³³

Gagasan Marx mengenai keadilan dapat didefinisikan bahwa alat-alat produksi dikelola dengan sifatnya sosial, yakni harus menjadi milik masyarakat karena alat itu dibuat untuk rakyat dan kepentingan rakyat. Alat-alat produksi harus dimiliki secara bersama, menjadi milik umum (communis). Kepmilikan alat-alat produksi secara bersama-sama ini hanya akan tercapai melalui jalan revolusi. Dalam teori mengenai akumulasi Marx mengemukakan adanya persaingan liar di antara para pemodal besar dan pemodal kecil.

Menurut Marx para pemodal besar akan berhasil pada perusahaan besar karena perusahaan besar itu akan memonopoli perusahaan kecil sehingga perusahaan kecil akan lenyap. Persaingan itu berujung pada krisis ekonomi yakni jika laba yang dihasilkan menurun tetapi produksi makin bertambah akhirnya pasar akan dibanjiri barang sehingga tidak ada lagi pembeli. Lalu produksi juga akan macet buruh-buruh dipecat dan menjadi makin miskin pada puncaknya, kaum buruh akan memberontak dan akan mengambil alih kekuasaan.

³³ *Opcit*, hlm. 73

Kesadaran dalam konsep revolusioner bukanlah hanya sebatas yang di hasilkan dari refleksi para intelektual melainkan suatu hasil dari dialektika perjuangan para kaum proletariat itu sendiri. Lenin mengakui sebagai pewaris tunggal gagasan Marx mengatakan kesadaran kaum buruh itu akan dipompa dari luar melalui partai komunis menurutnya revolusi tidak akan muncul dengan sendirinya melainkan harus ada kesadaran dari kaum buruh yang tumbuh dibutuhkan partai yang mengakomodasi sebuah kesadaran itu.

3. Teori keadilan John Rawls tentang kapitalisme yang dikemukakan oleh Locke mendapatkan perlawanan kuat dari Marx. Marx menentang dengan adanya penumpukan modal dan privatisasi alat-alat produksi (kapitalisme) sebagaimana dalam gagasan John Locke. Menurut Marx alat produksi harus dimiliki secara bersama atau dimiliki secara kolektif umum keadaan tanpa milik pribadi itulah yang dinamakan Marx sosialisme. Bagi Rawls apa yang digagas tentang liberalisme dan sosialisme keduanya tidak memadai menurutnya liberalisme Locke ia membenarkan ketimpangan sosial sedangkan sosialisme Marx menyingkirkan kebebasan-kebabasan dengan melihat komparasi teori itu maka John Rawls mengagas sebuah teori keadilan yang mengakomodasi kebebasan dan menjamin kesetaraan sosial.

Rawls menyebutkannya teori keadilan sebagai kewajiban *justice of fairness* teori ini sejenis dengan teori kontrak yang mengisyaratkan abstraksi tertentu, yakni abstraksi mengenai berkumpulnya orang-orang rasional, bebas, dan setara untuk menerima prinsip-prinsip keadilan dari sebuah posisi kesetaraan. Rawls menjelaskan

mengenai posisi kesetaraan adalah adanya selubung ketidaktahuan yakni tidak adanya seorang pun yang tahu mengenai tempat, posisi, status sosial di dalam masyarakat juga tidak seorang pun yang tahu mengenai kekayaan, kecerdasan, kekuatannya, dalam distribusi aset-aset kemampuan alami.³⁴

Sebagaimana yang dianalisa oleh Frans Magnis Suseno, Rawls mencapai kenetralan demikian dengan bertolak dari dua prapengandaian yang dianggapnya berlaku di masyarakat. *Pertama*, setiap orang ingin agar sedapat-dapatnya kepentingan sendiri terjamin. *Kedua*, memiliki sifat rasional, artinya mampu bertindak tidak semata-mata secara emosional, melainkan berdasarkan kepentingan itu. Rawls menjelaskan bahwa ada dua prinsip keadilan yang dipilih dibalik selubung ketidaktahuan dua prinsip keadilan itu adalah sebagai berikut. *Pertama* tiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan. *Kedua* ketidaksamaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian cara sehingga diharapkan memberi keuntungan bagi tiap-tiap orang dan posisi jabatan terbuka bagi setiap orang.³⁵

Rawls menyebutkan prinsip pertama sebagai prinsip kebebasan yang sama dan prinsip kedua adalah prinsip kesetaraan kesempatan yang fair, ditegaskan Rawls bahwa kedua prinsip tersebut adalah untuk mengatur bagaimana hak dan kewajiban diterapkan bagaimana keuntungan sosial dan ekonomi di distribusikan serta untuk menata masyarakat secara adil. Untuk menjadikan supaya efektif, kedua prinsip

³⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Oxford: University Press, 2007), hlm. 12

³⁵ Theo Huijbers, *Opcit*, hlm. 319

diatur secara organisir artinya, prinsip pertama harus mendahului prinsip kedua dengan kata lain, prinsip kebebasan yang sama harus diprioritaskan atas prinsip perbedaan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis laksanakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dalam penggalian data penulis mempelajari dan menelaah sejumlah literatur yang membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini menggunakan pendekatan sejarah artinya pendekatan dengan melihat situasi dan kondisi sejarah yang dilakukan adalah membuat bentuk deskripsi berupa narasi hasil analisis data yang berasal dari kisah sejarah pemikiran Tan Malaka baik dalam hal politik maupun ekonomi.³⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka bahan utama yang diteliti dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder. Dengan mengutip pendapat Gregory Churchill (1898) Soekanto mengemukakan bahwa data skunder

³⁶ Bachtiar, *Konsep Pembuatan Skripsi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 13

³⁷ *Ibid*, 14

terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tarsier. Bahan primer terdiri dari buku-buku Tan Malaka yang ia tulis langsung seperti *Madilog* (materialisme dialektika dan logika), *Gerpolek* (gerilya politik ekonomi), *Aksi Massa*, *Dari Penjara ke Penjara* dan *Merdeka 100%*. Sedangkan bahan sekunder bahan penunjang lain dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan primer. Adapun bahan tarsier adalah bahan yang menjelaskan bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus dan pendapat para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pertama bahan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik awal yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dari beberapa sejumlah literatur dari perpustakaan untuk dijadikan bahan pustaka yang berkaitan dengan konsep politik Tan Malaka dalam melawan kaum kapitalisme di Indonesia. Kedua bahan dikumpulkan dengan teknik studi naskah. Studi naskah merupakan teknik yang digunakan untuk mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul, kemudian mengutip bagian-bagian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan ini dilakukan dengan menginterpretasikan bahan yang berhasil dikumpulkan, sebelum menarik kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini analisis bahan dilakukan dengan metode kualitatif atau dengan menjelaskan bukan dengan metode kuantitatif dalam satuan angka. Logika yang digunakan adalah logika

deduktif yang menerangkan sesuatu dari hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁸

Terkait dengan permasalahan penelitian pada penelitian masalah secara keilmuan politik sebagai alat perlawanan untuk melawan hegemoni kapitalisme di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab memiliki sub bab bahaasan yaitu :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab II. Menjelaskan Biografi dan Konsep Politik Tan Malaka terdiri dari Kelahiran dan Kehidupan Tan Malaka, Pendidikan, Karya-Karya, Pandangan Tan Malaka tentang Politik, Tan Malaka Melihat Negara Indonesia, dan Sosialisme Tan Malaka.

Bab III. Perlawanan Tan Malaka Terhadap Hegemoni Kapitalisme di Indonesia terdiri dari Pergolakan Kelas Antara Kaum Proletariat dan Kaum Borjuis, Aksi Massa Menuju Revolusi Sosial, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam ditinjau Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

³⁸Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat banjar*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), hlm. 61

Bab IV. Penutup terdiri dari, Kesimpulan yang merupakan isi dari permasalahan peneliti dan Saran

